

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini ingin menganalisis tentang faktor-faktor terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura pada tahun 2017. Singapura memiliki sistem pemilihan umum yang hampir sama dengan negara-negara demokrasi lainnya, yakni dengan melibatkan rakyatnya secara langsung untuk memilih calon pemimpinnya. Sistem pemilihan seperti ini merupakan hasil dari amandemen undang-undang tentang pemilu pada tahun 1991, dimana sebelumnya pemilihan Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh parlemen. Peraturan pemilu tersebut mulai diberlakukan sejak 30 November 1991, dengan aturan pemilihan Presiden yang dilakukan dalam masa enam tahun sekali. Sejak saat itu, pemilihan Presiden dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Sedangkan, seorang Perdana Menteri yang menjadi pemimpin Kabinet, dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen.<sup>1</sup>

Akan tetapi, ada perbedaan dan perubahan yang cukup signifikan terkait mekanisme yang hadir pada pemilu presiden 2017 lalu, dimana model kegiatan pemilu yang sebelumnya dilakukan justru tidak dilaksanakan kembali. Hal tersebut bertepatan dengan adanya perubahan peraturan pada pemilihan Presiden tahun 2017 lalu, yang juga menjadikan pembeda dengan pemilihan-pemilihan

---

<sup>1</sup> Embassy Of The Republic Of Indonesia, *SINGAPURA*, diakses dalam <https://ex.kemlu.go.id/singapore/lc/Pages/Singapura.aspx> (9/7/2020, 15:43 WIB)

sebelumnya. Adanya pemilihan etnis Melayu untuk menjadi tokoh penting di Singapura merupakan salah satu peraturan baru dalam pilpres.<sup>2</sup>

Selain terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan persyaratan calon presiden tersebut, penelitian ini kemudian juga menarik karena beberapa alasan. Pertama, Halimah adalah seorang Presiden perempuan pertamanya di Singapura. Sepanjang sejarah kepemimpinan di Singapura, telah terjadi 5 kali pergantian presiden, dan dalam masa 5 kali pergantian tersebut belum pernah ada seorang perempuan yang mampu menduduki posisi tersebut. Sejak awal berdirinya Singapura, Presiden dan Perdana Menteri selalu dijabat oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan biasanya hanya berada pada tatanan jabatan anggota pemerintahan. Namun, untuk pertama kalinya sejak selama merdekanya Singapura, negara ini dipimpin oleh seorang Presiden dari kaum perempuan. Menurut Halimah Yacob kaum perempuan sangat mampu untuk menunjukkan eksistensinya ke depan publik.<sup>3</sup> Perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang maju sebagai orang pertama dalam sebuah negara yang dapat mengambil sebuah keputusan.

Sebenarnya, diberbagai negara terdapat beberapa perempuan yang terlibat dengan urusan konstitusional. Namun, meskipun begitu jarang terdapat perempuan yang memimpin atau menjadi pemimpin di sebuah negara. Bahkan di negara yang sangat demokrasi seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan sebagainya. Meskipun negara-negara tersebut dikenal dengan negara yang demokrasi akan tetapi pemimpinnya tetap saja dari kalangan laki-laki. Walaupun

---

<sup>2</sup> Eva Mazrieva, *Kandidat Lain Gagal Penuhi Kriteria, Halimah Yacob Jadi Presiden Singapura*, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kandidat-lain-gagal-penuhi-kriteria-halimah-yacob-jadi-presiden-singapura/4024190.html> (7/12/2019, 20:30 WIB)

<sup>3</sup> PPIS, *Aura Hawa- HALIMAH YACOB*, diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=pYPTWQsnZVY> (10/12/2019, 12:01 WIB)

saat ini banyak negara yang memberi ruang kepada perempuan dalam ranah politik, dan juga hakikatnya perempuan memiliki andil yang penuh terhadap kehidupan politik sehari-hari namun masih saja kebanyakan pemimpinnya adalah laki-laki.<sup>4</sup>

Selain itu, Halimah Yacob juga merupakan seorang muslim pertama dalam kepemimpinan Singapura. Ia adalah muslim satu-satunya yang menjabat sebagai Presiden sejak berdirinya Singapura. Sedangkan, muslim di Singapura termasuk kelompok yang minoritas, karena jumlahnya yang terbatas. Halimah salah satu seseorang yang mampu mematahkan adanya barir-barir dalam Islam mengenai larangan perempuan muslim menjadi *Khalifah* atau pemimpin. Dengan keyakinan yang ia pegang teguh, Halimah pun mampu menerjang pandangan Islam, bahwa tidak hanya laki-laki saja yang berhak menjadi pemimpin, karena sebenarnya tujuan negara didirikan adalah untuk mewujudkan sebuah kemakmuran.<sup>5</sup>

Maka dari itu, pemimpin yang baik, jujur, dan bijaksana adalah pemimpin yang mampu membawa kedamaian dan kemakmuran pada negaranya, bukan pemimpin yang walaupun laki-laki namun tidak memiliki sikap tersebut. Halimah membuktikan bahwa tidak selamanya perempuan menjadi seorang pendamping saja dalam ranah politik. Selagi ia mampu untuk membawa negaranya maju dan menerapkan kemakmuran, maka ia sangat layak untuk menjadi pemimpin.<sup>6</sup> Sehingga, hal ini akan menjadi sejarah Singapura ketika seorang muslim berhasil mendapatnya jabatan sebagai orang nomor satu di Singapura.

---

<sup>4</sup> Liky Faizal, *Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)*, Jurnal TAPIs, Vol, 12, No, 3 (2016), hal. 94.

<sup>5</sup> Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Khazanah, Vol, 6, No, 1 (2013), hal. 69.

<sup>6</sup> PPIS, *Loc. Cit.*

Keistimewaan yang terakhir adalah Halimah Yacob merupakan seseorang dari kelompok etnis yang minoritas yakni Melayu. Singapura merupakan negara yang dikenal dengan berbagai macam etnisnya, sehingga hal inilah yang menjadikan Singapura disebut sebagai negara mult-etnis. Etnis-etnis yang berada di Singapura merupakan etnis percampuran dari negara-negara tetangganya seperti etnis Cina, Melayu, India dan beberapa etnis campuran lainnya. Terpilihnya Halimah menjadi Presiden dari kelompok minoritas memang bukan untuk pertama kalinya. Namun, untuk kelompok etnis Melayu, Halimah adalah representasi pertama sejak terpilihnya Yusof Ishak menjadi presiden yang juga dari etnis Melayu.<sup>7</sup>

Peraturan etnis Melayu diatas sebenarnya merupakan gagasan langsung oleh Perdana Menteri Singapura saat ini yaitu Lee Hsien Loong. Ia berpendapat bahwa setiap etnis di Singapura mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negaranya, tentunya dengan berbagai syarat dan ketentuan.<sup>8</sup> Melayu adalah ras ketiga yang mendapatkan kesempatan untuk menunjuk wakilnya maju mendapatkan kursi nomer satu di Singapura, setelah Cina dan India. Farid Khan dan Salleh Marican serta Halimah Yacob adalah kandidat-kandidat dari etnis Melayu yang mendaftarkan diri untuk merebutkan kursi kepresiden Singapura saat itu.<sup>9</sup> Namun karena dua kandidat diantaranya tidak berhasil melengkapi persyaratan dengan baik, sehingga hanya terdapat satu kandidat saja yang berhasil dikatakan layak maju untuk menduduki kursi kepresidenan.

---

<sup>7</sup> Visit Singapore, *Ragam Rupa Singapura*, diakses melalui [https://www.visitsingapore.com/id\\_id/travel-guide-tips/about-singapore/people-of-singapore/](https://www.visitsingapore.com/id_id/travel-guide-tips/about-singapore/people-of-singapore/) (11/12/2019)

<sup>8</sup> Arman Dhani, *Dibalik Terpilihnya Presiden Singapura Perempuan dan Melayu* diakses dalam <https://tirto.id/di-balik-terpilihnya-presiden-singapura-perempuan-amp-melayu-cwyr> (11/10/2018, 13:20 WIB)

<sup>9</sup> Toast Speech By Halimah Yacob at State Banquet, diakses dalam <http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20180509001/Toast%20Speech%20by%20President%20Halimah%20Yacob%20at%20State%20Banquet.pdf> (11/10/2018, 14:00 WIB)

Selain itu, terdapat juga perubahan peraturan pada pemilihan Presiden mengenai syarat penetapan dari dua sektor, yaitu sektor bisnis dan sektor publik. Sektor publik sendiri merupakan sektor yang diperuntukan bagi kandidat yang berasal dari publik atau biasanya berkecimpung dalam ranah pemerintahan, sedangkan sektor bisnis atau swasta merupakan sektor yang diperuntukan bagi kandidat dari seorang pengusaha. Persyaratan dari sektor swasta mengatakan bahwa para kandidat calon presiden harus memiliki saham minimal 500 juta DSG pada masing-masing perusahaannya. Sedangkan, dari sektor publik harus merupakan individu yang memiliki pengalaman duduk di kursi eleison tinggi pemerintahan selama minimal 3 tahun.

Madam Halimah Yacob atau biasa dikenal dengan Halimah Yacob adalah kandidat calon Presiden yang berhasil memenuhi semua persyaratan dan ketentuan peraturan pilpres saat itu. Halimah terpilih menjadi presiden karena ia adalah satu-satunya orang atau kandidat yang mendapat sertifikat kelayakan dari *Presidential Election Committee* (PEC) atau Komite Pemilihan Presiden.<sup>10</sup> Ia disebut sebagai perempuan muslim pertama yang menjadi Presiden di Singapura. Halimah menjadi presiden yang kedelapan pada tahun 2017 lalu. Sebelum mengikuti pemilihan untuk menjadi Presiden Halimah sendiri merupakan seorang Direktur *National Trades Union Congress* (NTUC) dari Sekretariat Pengembangan Perempuan, dan Sekretaris Eksekutif Serikat Pekerja Industri Elektronik dan Listrik, serta wakil dari NTUC di berbagai komite nasional termasuk Komite Tinjauan Ekonomi.<sup>11</sup> Halimah Yacob juga merupakan

---

<sup>10</sup> Garry Rodan, *Singapore's Elected presiden: A Failed Institution*, *Australian Journal of International Affairs*, Vol, 72, No, 1(2017), hal. 10-15.

<sup>11</sup> The ISTANA, *President Halimah Yacob*, diakses dalam <https://www.istana.gov.sg/the-president/biography> (16/10/2018,21:20 WIB)

perwakilan Singapura dalam Organisasi Buruh Internasional yang mana berbasis Jenewa selama 12 tahun, sekaligus menjadi orang pertama yang terpilih untuk menjadi anggota ILO atau *International Labour Organization*.<sup>12</sup>

Pada tahun 2001, Halimah terpilih untuk pertama kalinya menjadi Anggota Parlemen di Konstituensi Representasi Kelompok Jurong. Ditambah Halimah juga pernah terpilih sebagai Ketua Parlemen yang kesembilan untuk pertama kalinya. Ia juga termasuk anggota dalam partai politik *People's Action Party* atau Partai Aksi Rakyat disingkat PAP yang mendominasi di Singapura.<sup>13</sup> Meskipun ia telah mendapat banyak gelar serta pengalaman, Halimah tetap melanjutkan pendidikannya sebagai sarjana hukum dan Magister Hukum di National University of Singapore. Selain pejuang bagi para buruh, Halimah juga tak melupakan kodratnya sebagai wanita yang mana ia juga fokus terhadap isu-isu tentang perempuan, yang pada akhirnya dianugerahi *Women of the Year* oleh *Her World Magazine* pada tahun 2003.<sup>14</sup> Tak kalah pentingnya Halimah juga merupakan *inductee* dari *Singapore Women's Hall of Fame* pada 2014.

Namun, terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden mendapat gelombang penolakan dari beberapa masyarakat Singapura. Ia dianggap gagal karena dipilih secara tidak demokratis.<sup>15</sup> Beberapa masyarakat dari etnis non-Melayu mengatakan bahwa suara untuk calon pemimpinnya telah dicuri. Beberapa lainnya terutama dari kaum Muslim menilai bahwa kepemimpinan oleh perempuan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Rizky Sekar Afrisia dan Reuters, *PAP Kembali Dominasi Singapura*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150912044512-106-78225/pap-kembali-dominasi-singapura> (20/01/2020, 16:00 WIB)

<sup>14</sup>Women of The Year, diakses dalam <https://womanoftheyear.herworld.com/2003-halimah-yacob> (16/10/2018, 21:50 WIB)

<sup>15</sup>*Ibid.*

muslim ditunjukkan oleh Halimah Yacob tidak sesuai dengan syariat agama.<sup>16</sup> Banyak masyarakat Singapura yang bahkan beragama muslim menentang adanya kepemimpinan Halimah Yacob. Selain itu, banyak pula masyarakat dari etnis maupun agama lain berpendapat bahwa terpilihnya Halimah menjadi presiden dan melihat kondisi politik saat ini, memiliki peluang besar mendapat ancaman teroris Islamis, yang faktanya Singapura dikelilingi negara-negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Muslim di Singapura sendiri termasuk dalam minoritas yang mana hidup di tengah masyarakat plural dan multi kultural.<sup>17</sup> Jumlah Muslim di Singapura hanya 15 persen dari seluruh jumlah penduduk, dimana sekitar 13,4 persen diantaranya etnis Melayu.<sup>18</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan penelitian ini ntuk menjawab pertanyaan “Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Halimah Yacob selaku perempuan muslim pertama yang menjadi Presiden Singapura periode 2017?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami adanya pengaruh sistem politik *power-sharing* dalam terpilihnya Halimah Yacob.

---

<sup>16</sup>Tessa Wong, *Why Singaporeans Aren't All Glad to Get The President They Wanted*, diiakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-41237318> (10/12/2019, 20:10 WIB).

<sup>17</sup> Suzaina Kadir, dalam jurnal Helmiati, *Dinamika Islam Sinugapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekural dan Multikultural*, Toleransi, Vol, 5 No, 2 (2013)

<sup>18</sup>*Ibid.*,

2. Untuk menjelaskan terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura tahun 2019 karena dipengaruhi adanya pembagian kekuasaan atau *power-sharing*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat Akademis dan manfaat Praktis. Keduanya akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis yang membantu menambah pemahaman dan wawasan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai faktor-faktor terpilihnya Halimah Yacob menjadi presiden Singapura, yang diduga adanya pengaruh pembagian kekuasaan atau *power-sharing* yang tertuang dalam sebuah peraturan pilpresnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang mana bisa menjadi rujukan bagi organisasi-organisasi internasional non pemerintah dalam melihat perannya terhadap suatu isu tertentu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional, yang berfokus pada pengaruh sistem politik dalam hal ini *power-sharing* dalam terpilihnya seorang pemimpin.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *power-sharing* dan



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terpilihnya Halimah Yacob Menjadi Presiden Singapura Tahun 2017.

Penelitian pertama berjudul *Power-sharing: A gender intervention* oleh Allison McCulloch.<sup>19</sup> Fokus penelitian ini adalah tentang kritik terhadap pendekatan *power-sharing* yang menganggap bahwa konsep pembagian kekuasaan ini buta terhadap gender. Dalam penelitian terdahulu penulis juga mengintegrasikan perspektif gender, dengan memberikan saran untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam ranah perpolitikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dimana masing-masing penelitian sama-sama membahas mengenai pembagian kekuasaan yang berbasis pada etnisitas maupun kelompok-kelompok tertentu lainnya, dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap kelompok yang non-dominan.

Adapun terdapat pula perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa konsep pembagian kekuasaan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Apabila penelitian ini melihat konsep *power-sharing* atau pembagian kekuasaan sebagai konsensus untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian, pada penelitian terdahulu justru menjelaskan bahwasanya pembagian kekuasaan dianggap menimbulkan masalah baru bagi kaum perempuan, yang mana dominasi di kursi pemerintahan didominasi oleh kaum laki-laki sehingga hak dan keistimewaan dari adanya pembagian kekuasaan tidak didapatkan oleh perempuan sama sekali.

---

<sup>19</sup> Allison McCulloch, *Power-sharing: A gender intervention*, International Political Science Review, Artikel 1-14, Brandon University of Canada.

Penelitian kedua berjudul *Iraqi Parliamentary Institution: Power Sharing In Iraq Parliament* oleh Ammar Saadoon Salman Albadry.<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian kekuasaan dapat mempengaruhi lembaga parlemen di Irak. Hal tersebut didasari oleh adanya perdebatan mengenai cocok tidaknya sistem demokrasi konsesnsual yang didalamnya terdapat pembagian kekuasaan untuk sistem pemerintahan di Irak. Oleh karena itu, penelitian ini menguji tantangan sejarah yang mempengaruhi parlemen Irak dengan fokus khusus pada *power-sharing* atau pembagian kekuasaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah masing-masing memiliki kesaamaan membahas mengenai *power-sharing* atau pembagian kekuasaan dalam parlemen sebuah negara, dalam arti memiliki kesamaan dengan sebuah kesepakatan atau mendistribusikan kekuasaan untuk lembaga politiknya. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya yakni dalam penelitian ini substansinya menjelaskan mengenai keberhasilan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara terhadap terpilihnya seorang pemimpin atau presidennya. Sedangkan penelitian terdahulu berbanding terbalik, yaitu menganggap bahwa pembagian kekuasaan dianggap gagal dalam penerapannya di parlemen negara Irak.

Penelitian yang ketiga berjudul *Africa: The Limits of Power-Sharing* oleh Ian S. Spears.<sup>21</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai tidak dapatnya pembagian kekuasaan berjalan dengan baik setelah dianggapnya sebagai solusi

---

<sup>20</sup> Ammar Saadoon Salman Albadry, *Iraqi Parliamentary Institution: Power Sharing in Iraq Parliament*, European Law and Politics Journal (ELP), Vol, 1, No, 1 (July 2014), Malaysia: University Utara Malaysia.

<sup>21</sup> Ian S. Spears, *Africa: The Limits of Power-Sharing*, Journal of Democracy, Vol, 13, No, 3 (July 2002), Amerika Serikat: Johns Hopkins University Press.

terhadap adanya konflik. Pembagian kekuasaan dinilai sulit diterapkan dan jarang bertahan setelah diadopsi dalam sebuah pemerintahan. Hal tersebut didasarkan bahwa dalam implementasinya pembagian kekuasaan tidak menyelesaikan konflik tetapi justru sebaliknya, dan dianggap hanya dapat memindahkan konflik sementara waktu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah masing-masing dari penelitian ini sama-sama memiliki keyakinan bahwasanya pembagian kekuasaan sebagai satu solusi untuk mencegah bahkan menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di sebuah negara multietnis yang berpotensi terjadi konflik. Dalam penelitian keduanya terdapat pula perbedaannya yaitu dalam pengimplementasiannya keduanya menggunakan pendekatan *power-sharing* dari Lijphart, namun pada penelitian terdahulu pendapat Lijphart mengenai pembagian kekuasaan tidak dapat diterapkan di Afrika, hal tersebut dikarenakan konflik atau permasalahan di Afrika terjadi karena ancaman dari luar atau eksternal.

Penelitian yang keempat berjudul ***Power Sharing Theory and Deliberation; a New Perspective*** oleh Ramin Mafakheri.<sup>22</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam teoritis pembagian kekuasaan atau *power-sharing* menurut Lijphart, yang menekankan pembentukan lembaga-lembaga demokratis. Padahal dalam prakteknya konsep pembagian kekuasaan juga harus termasuk dalam perspektif studi budaya. Sehingga pada dekade terakhir telah terdapat upaya yang signifikan untuk mengembangkan aspek budaya dari teori pembagian kekuasaan.

---

<sup>22</sup> Ramin Mafakheri, *Power Sharing Theory and Deliberation; A New Perspective*, European Journal of Social Sciences, Vol, 53, No, 4 (Desember 2016), Irak: Nawroz University

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, basic konsep dari pembagian kekuasaan oleh Lijphart yang menekankan pentingnya budaya politik di tingkat elit dalam masyarakat yang terpecah-pecah. Sedangkan perbedaan dari keduanya yakni apabila dalam penelitian ini penulis menjelaskan pengaruh adanya *power-sharing* atau pembagian kekuasaan terhadap sistem politik, maka dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kerangka kerja teoritis dari pembagian kekuasaan harus diperhatikan tidak hanya dari perspektif institusionalisme, tetapi juga harus ditunjukkan dari sudut pandang behavioralisme.

Penelitian yang kelima berjudul *The European Union and Interethnic Power-Sharing Arrangements in Accession Countries* oleh Martin Brusic.<sup>23</sup> Penelitian tersebut fokus pada dampak yang diberikan oleh Uni Eropa pada politik antaretnis dalam negara yang telah bergabung. Penulis dalam penelitian tersebut juga menjelaskan Uni Eropa telah berkontribusi terhadap munculnya pengaturan pembagian kekuasaan di negara-negara yang telah bergabung, karena kebijakan perlindungan minoritasnya telah dipandu oleh pendekatan keamanan yang memprioritaskan penyelesaian perselisihan berdasarkan kesepakatan atas penegakan norma-norma universal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah masing-masing dari penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep pembagian kekuasaan yang didasarkan untuk berbagi kekuasaan secara konsultatif dengan kelompok-kelompok minoritas. Dimana dengan adanya sistem tersebut hak-hak minoritas akan dilindungi sehingga mencegah terjadinya konflik. Adapun

---

<sup>23</sup> Martin Brusic, *The European Union and Interethnic Power-sharing Arrangement in Accession Countries*, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 1/2003, Jerman: University of Munich.

perbedaan dari keduanya yaitu apabila penelitian ini fokus terhadap implementasi *power-sharing* dalam peraturan pemilu, maka dalam penelitian terdahulu lebih menekankan munculnya peraturan pembagian kekuasaan antara aktor politik yang mengakomodasi perpecahan etnis di negara-negara akses.

Penelitian yang keenam berjudul *Power sharing, peace and democracy: Any Obvious relationship?* oleh Helga Malmin Binningsbo.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada hubungan antara pembagian kekuasaan, perdamaian, dan demokrasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang mana sama-sama berdasarkan perdamaian, dalam arti pembagian kekuasaan diantara keduanya memiliki fungsi yang sama. Pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai adanya pembagian kekuasaan sebagian besar dipahami sebagai lawan politik dari koalisi eksekutif bersama pemerintah, yang saat ini merupakan pendekatan yang dominan untuk menyelesaikan konflik.

Penelitian ketujuh berjudul *Strategic vote trading in power-sharing systems* oleh Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang desentralisasi adanya “*vote trading*” dalam sistem pembagian kekuasaan yang mengikuti aturan permainan pasar yang strategis. Selain itu penelitian tersebut fokus terhadap pemilihan dua partai, yang sebelum tahap pemungutan suara, para pemilih dapat dengan bebas “memperdagangkan” suara untuk mendapat suara. Dimana dalam “perdagangan” suara tersebut pemilih akan mendapatkan sejumlah uang dari partai yang akan dipilihnya. Kontribusi peneliti

---

<sup>24</sup> Helga Malmin Binningsbo, *Power sharing, peace and democracy: Any obvious relationships?*, Peace Research Institute Oslo, diakses dalam <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2233865912473847> (26/6/2020, 21:39 WIB)

<sup>25</sup> Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros, *Strategic vote trading in power-sharing systems*, Department of Economics, Working Paper No.01, 2016, University of Cyprus.

terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya pembagian kekuasaan yang dinilai membawa dampak positif, dimana semua pihak “yang terwakili” dapat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, yang pastinya berpengaruh terhadap kelompok yang terwakilkan.

Perbedaan antara keduanya yaitu, apabila penelitian ini membahas mengenai pembagian kekuasaan guna untuk mengurangi konflik, yang mana *power-sharing* berkontribusi dalam peraturan pemilunya, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap bagaimana pengaruh pembagian kekuasaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang kedelapan berjudul ***Democracy and Power-Sharing in Multi-National States*** oleh Matthijs Bogaards.<sup>26</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan erat antara demokrasi dan pembagian kekuasaan terutama di masyarakat yang majemuk. Persamaanya dengan penelitian ini yaitu *power-sharing* atau pembagian kekuasaan merupakan terobosan dalam pemikiran tentang demokrasi dalam masyarakat yang terpecah. Pembagian kekuasaan dianggap solusi ampuh yang digunakan untuk mencegah ketegangan antar kelompok di suatu wilayah.

Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih lanjut menjelaskan mengenai penerapan pembagian kekuasaan dalam penyelesaian pasca konflik. Efektif tidaknya tergantung pada pemerintah suatu negara yang mengaturnya. *Power-sharing* dianggap atau dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan pasca konflik, pembagian kekuasaan juga dianggap sebagai solusi yang bersifat “sementara” dalam mengatasi konflik terutama konflik tentang

---

<sup>26</sup> Matthijs Bogaards, *Democracy and Power-Sharing in Multi-National States*, International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol, 8, No, 2 (2006), Jacobs University Bremen

perpecahan etnis apabila tidak didukung dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Sebaliknya pembagian kekuasaan dapat menjadi solusi yang tepat apabila mekanisme implementasi serta hubungan pemerintah yang berjalan sebagaimana mestinya dilakukan dengan tepat.

Penelitian yang kesembilan adalah *Power-Sharing Arrangements in Sri Lanka* oleh K.M. de Silva.<sup>27</sup> Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan pembagian kekuasaan di tingkat Dewan Menteri di Sri Lanka. Sistem tersebut dilakukan pada tahun 1931 dengan memilih perwakilan dari kelompok keagamaan. Persamaan keduanya yakni terletak pada praktik *power-sharing* atau pembagian kekuasaan yang mana memberi kesempatan pada perwakilan semua kelompok etnis dan agama dalam kabinet dan Kementerian. Terdapat partai yang bernama *United National Party* (UNP) dan *Sri Lanka Freedom Party* (SLFP) yang menjadi representasi dari kelompok etnis, agama, serta kasta.

Selain itu praktik pembagian kekuasaannya juga dengan membangun koalisi dimana partai-partai nasional membentuk aliansi dengan partai-partai politik lain, mengundang orang-orang non-partai atau independen untuk bergabung dengan kabinet. Bahkan terdapat pembagian kekuasaan di tingkat elektoral yakni dengan pemilihan partai politik yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu selain memperhatikan aspek “berbagi” kekuasaan dalam *power-sharing*, perlu juga memperhatikan aspek “*economic power*” seperti halnya “*political power*” dalam manifestasinya. Karena dinilai dalam pembagian kekuasaan

---

<sup>27</sup> K.M. de Silva, *Power Sharing Arrangements in Sri Lanka*, Clingendael, Working Paper No.4, 2001, Netherlands Institute of International Relations

distribusi aspek ekonomi belum terlalu diperhatikan, walaupun penting dan parsial perannya dalam pembagian kekuasaan.

Penelitian yang kesepuluh berjudul *The Prevalence of Power-Sharing: Exploring the Patterns of Post-Election Peace* oleh Anna K. Jarstad.<sup>28</sup> Penelitian tersebut mengenai penyebab beberapa pemilu yang diikuti konflik bersenjata. Penelitian tersebut juga memetakan prevalensi perjanjian pembagian kekuasaan dan pola perdamaian pasca pemilihan di negara-negara yang hancur oleh perang saudara. Penjelasan lainnya yaitu demokrasi yang dibangun diatas gagasan persaingan politik bebas dan hasil pemilu yang tidak pasti, pembagian kekuasaan mengurangi ketidakpastian dengan memastikan kekuatan politik kelompok-kelompok tertentu.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai beberapa negara Afrika, pemerintahannya telah dibentuk berdasarkan pakta pembagian kekuasaan yang dinegosiasikan oleh elit alih-alih pada hasil pemilihan umum. Sama dengan penelitian ini, dimana penelitian membahas mengenai Singapura yang memiliki sistem politik dengan praktik pembagian kekuasaan pada pemilu presidennya.

**Table 1.1 Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Allison McCulloch	<i>Power-sharing: A gender intervention</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif  Konsep:	Hasil dari penelitian ini adalah adanya strategi preskriptif yang mendorong desain serta adopsi aturan-aturan konsultif yang menawarkan

<sup>28</sup> Anna K. Jarstad, *The Prevalence of Power-Sharing: Exploring the Patterns of Post-Election Peace*, JSTOR, Vol, 44, No, 3 (2009), Germany: Institute of Africa Affairs, hal.42.



			<i>Power-Sharing Theory</i>	perlindungan dan perwakilan hak untuk kelompok-kelompok diluar pembagian etnis. Selain itu dalam penelitian tersebut ditemukannya hasil bahwa teori pembagian kekuasaan atau <i>power-sharing</i> sudah matang untuk mengintervensi gender kedalam implementasinya.
2.	AmmarSaadoon Salman Albadry	<i>Iraqi Parliamentary Institution: Power Sharing In Iraq Parliament</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif  Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i>	Hasil atau temuan dari penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa demokrasi konsensual tidak cocok untuk Irak sebagai sistem pemerintahannya. Temuan lain juga mengungkapkan bahwa demokrasi konsensual secara negatif mempengaruhi peran legislatif dan pengawasan parlemen Irak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa demokrasi konsensual bertanggung jawab atas kegagalan demokrasi Irak. Dalam penelitian ini juga menyebutkan sejalan dengan pendekatan institusionalisme yang menyatakan bahwa faktor tertentu seperti pembagian kekuasaan dapat mempengaruhi peran fungsional parlemen Irak itu sendiri.
3.	Ian S. Spears	<i>Africa: The Limits of Power-Sharing</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah upaya untuk memasukkan anggota oposisi yang diakui dalam pemerintah dapat

			<p>Konsep: <i>Power-Sharing</i> dan <i>Balance of Power</i></p>	<p>berfungsi sebagai langkah membangun kepercayaan dan dapat menunjukkan keinginan untuk perdamaian. Dalam beberapa keadaan, <i>power-sharing</i> atau pembagian kekuasaan juga dapat berperan dalam sosialisasi politik dan dengan demikian dapat membantu memfasilitasi transisi dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya.</p>
4.	Ramin Mafakheri	<i>Power Sharing Theory and Deliberation; a New Perspective</i>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i></p>	<p>Temuan atau hasil dari penelitian ini adalah bahwa sementara teori pembagian kekuasaan pada prinsipnya diakui di antara teori-teori demokrasi yang hanya berurusan dengan lembaga-lembaga demokratis, teori ini juga harus dipertimbangkan sampai batas waktu tertentu.</p>
5.	Martin Brusis	<i>The European Union and Interethnic Power-Sharing Arrangements in Accession Countries</i>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i> dan <i>Security Approach</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Uni Eropa memang telah mendukung munculnya pengaturan pembagian kekuasaan konsultasional antara aktor politik yang mengakomodasi perpecahan etnis di negara-negara aksesori (yang telah bergabung dengan EU). Sehingga secara kebetulan Uni Eropa telah mempengaruhi konstelasi aksesori, karena perlindungan minoritasnya telah</p>

				dipandu oleh pendekatan keamanan yang memprioritaskan penyelesaian perselisihan berdasarkan kesepakatan atas penegakan norma-norma universal.
6.	Helga Malmin Binningsbo	<i>Power sharing, peace and democracy: Any Obvious relationship?</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Eksplanatif  Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i>	Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hubungan antara <i>power-sharing</i> , perdamaian dan demokrasi. Dalam penjelasannya penulis menjabarkan <i>power-sharing</i> dengan kedua variabel tersebut. Sehingga ditemukan bahwa efektif tidaknya <i>power-sharing</i> digunakan untuk menganalisa sebuah fenomena tergantung sesuai dengan para peneliti, tepat tidaknya mereka menggunakan jenis pembagian <i>power-sharing</i> dalam penelitian mereka.
7.	Dimitrios Xefferis and Nicholas Ziros	<i>Strategic vote trading in power-sharing systems</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Analitik  Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i>	Hasil dari penelitian ini adalah adanya keberadaan umum dari keseimbangan perdagangan penuh yang unik (keseimbangan di mana tidak ada yang menahan diri dari perdagangan suara). Penulis juga berpendapat bahwa perdagangan suara dalam sistem pembagian kekuasaan jelas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah pemilih.
8.	Matthijs Bogaards	<i>Democracy and Power-</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif	Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan

		<i>Sharing in Multi-National States</i>	<p>Kualitatif</p> <p>Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i></p>	mengenai hubungan antara demokrasi dan pembagian kekuasaan pada negara multi-nasional. Partisipasi rakyat dalam politik dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pengaturan pembagian kekuasaan yang rapuh memungkinkan demokrasi dan menjaga perdamaian sosial dalam masyarakat multi-etnis.
9.	K.M. de Silva	<i>Power-Sharing Arrangements in Sri Lanka</i>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i></p>	Temuan dari penelitian ini adalah adanya pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok di pemerintahan multi-etnis di Sri Lanka. Terdapat dimensi “vertical” terhadap pembagian kekuasaan dengan masing-masing kelompok etnis. Pembagian kekuasaan yang terdapat pada sistem pemerintahan di Srilanka dibentuk untuk agar semua perwakilan kelompok dalam hal ini keagamaan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
10.	Anna K. Jarstad	<i>The Prevalence of Power-Sharing: Exploring the Patterns of Post-Election Peace</i>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kuantitatif</p> <p>Konsep: <i>Power-Sharing</i></p>	Hasil dari penelitian ini adalah, bagi Afrika pengaturan pembagian kekuasaan telah gagal dalam mempromosikan perdamaian dan demokrasi. Namun, karena banyak kasus pembagian kekuasaan yang relatif berhasil di seluruh dunia telah berkembang dalam

				jangka waktu yang lama, dimana pengaturan awal untuk pembagian kekuasaan telah diamandemen, maka lembaga yang lebih kuat telah dibangun dan aktor-aktor politik sadar bahwa kerjasama lebih bermanfaat daripada konflik. Hal ini membawa sebuah harapan bahwa Afrika akan menerapkan pembagian kekuasaan yang benar sehingga mendapat <i>output</i> yang positif.
11.	Nadela Rahma Desi Supriadi	Faktor-faktor Yang Memengaruhi Terpilihnya Halimah Yacob Menjadi Presiden Singapura	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif  Konsep: <i>Power-Sharing Theory</i>	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi Halimah Yacob selaku perempuan muslim pertama yang menjadi Presiden di Singapura pada tahun 2017 lalu. Adapun faktor-faktor yang dijabarkan dalam penelitian ini oleh penulis yang berkaitan tentang pembagian kekuasaan.

Setelah menjelaskan dan menjabarkan beberapa literatur diatas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Pembahasan mengenai implementasi *power-sharing* dalam aturan-aturan praktik pemerintahan sudah pernah ditulis dalam penelitian Allison McCulloch (2019) dalam perspektif gender dan K.M. de Silva (2001) dalam perspektif keagamaan. Sedangkan Ammar Saadoon (2014) Matthijs Bogaard (2006) Helga Malmin (2013) serta Martin Brusis (2003) mengatakan bahwa *power-sharing* digunakan untuk menjaga

perdamaian dengan memberikan kelompok-kelompok minoritas kedudukan dalam kursi pemerintahan.

Dalam perspektif yang berbeda, Ian S. Spears (2002), Ramin Matahkeri (2017), Anna K. Jarstad (2009) menjelaskan bahwa *power-sharing* tidak dapat menjadi solusi utama yang diterapkan ketika dihadapkan dengan konflik-konflik yang cenderung bereskalasi besar, terutama pada negara-negara yang multi-etnis. Terdapat juga penelitian Dimirios dan Nicholas (2016) yang membahas adanya “perdagangan suara” dalam pembagian kekuasaan. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya penelitian yang menggunakan perspektif *power-sharing* dalam menganalisis peraturan pemilihan umum, yang kemudian berdampak pada terpilihnya seseorang menjadi presiden. Penelitian ini ingin mengisi *gap* tersebut.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu cara yang mendasari terbentuknya teori dimana suatu fenomena yang terjadi digeneralisasikan oleh ilmuwan yang meneliti melalui pengumpulan-pengumpulan data yang telah dikelola sebelumnya. Konseptualisasi merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan suatu objek dari fenomena tertentu atau dengan kata lain konsep dapat digunakan untuk mewakili suatu gambaran fenomena yang digunakan dalam keseharian untuk mengeneralisasikan fenomena-fenomena tersebut menjadi lebih sederhana untuk di pahami. Dalam Ilmu sosial, konsep adalah hal-hal yang merujuk pada objek beserta sifat-sifat yang diteliti seperti individu, kelompok, negara, dan organisasi internasional.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

---

<sup>29</sup> Mochtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES hal.109-110

landasan konseptual yang merujuk kepada konsep *power-sharing* atau pembagian kekuasaan yang secara tidak langsung hadir dan mempengaruhi terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura tahun 2017 lalu.

### **1.6.1 *Power-Sharing***

Dalam sebuah negara, sistem politik sangat diperlukan untuk kelangsungan berjalannya struktur pemerintahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara terdapat sekelompok manusia sebagai makhluk sosial, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Sedangkan, politik sendiri pada dasarnya merupakan fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia. Itulah sebabnya sistem politik dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekelompok manusia yang berada dalam sebuah negara tersebut. Selain itu, sistem politik juga dibutuhkan untuk menjalin hubungan antara berbagai lembaga negara dan kelompok-kelompok penekan serta partai politik dalam negara itu sendiri guna mewujudkan proses perkembangan manusia itu sendiri. Dengan kata lain hakekat dari politik sendiri adalah bentuk dari perilaku manusia. Perilaku atau tingkah laku tersebut berupa kegiatan, aktivitas, maupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.<sup>30</sup>

Sistem politik sendiri merupakan sub-bab dari sistem sosial, sehingga dalam sistem politik ini terdapat beberapa pendekatan untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku sosial salah satunya adalah pembagian kekuasaan. *power-sharing* atau pembagian kekuasaan merupakan teori yang bukan hanya

---

<sup>30</sup> Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)*, Vol, 21, No, 2, (2005), hal: 275-276.

sekedar teori empiris, tetap juga teori preskriptif. Teori ini merekomendasikan demokrasi konsensus atau konsosiasional kepada negara mana pun yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis atau yang ingin mengubah bentuk demokrasi, serta merekomendasikan konsosiasionalisme bagi negara-negara yang terpecah-pecah. Demokrasi konsosiasionalisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu kombinasi antara unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi modern. Saran kebijakan seperti itulah yang didasarkan pada teori *power-sharing*, dan dibenarkan hanya jika kita dapat cukup yakin bahwa teori yang mendasarinya sudah valid.<sup>31</sup>

Salah satu tokoh yang fokus terhadap konsep *power-sharing* adalah Arend Lijphart, ia juga merupakan ilmuwan politik yang menjadi salah satu orang pertama dengan menggambarkan dan berteori tentang *consociational democracy* dalam masyarakat yang terpecah. Sehingga ia dikenal sebagai “*father of Power-Sharing*”. Ketertarikannya terhadap konsep ini muncul ketika ia mempelajari sistem politik Eropa yang majemuk. Konsep yang ia miliki menunjukkan dua dimensi: yaitu dimensi sosial dan politik. Dalam dimensi sosial ia lebih mengacu pada karakter masyarakat yang plural. Sedangkan politik, mengacu pada politik kerjasama dari para elit, hal ini dikarenakan Lijphart merumuskan model berdasarkan interaksi politik elit di negara Eropa serta semua negara yang relatif damai dan makmur.<sup>32</sup>

Dalam penerapannya pembagian kekuasaan atau *power-sharing* tidak selalu relevan untuk semua jenis negara, dalam arti tidak semua negara dapat

---

<sup>31</sup> Mochtar Mas'ood, *Op. Cit*, hal. 78.

<sup>32</sup> Arend Lijphart, *Op. Cit*.



menerapkan prinsip atau sistem pembagian kekuasaan ini. Hal tersebut karena setiap negara memiliki dimensi sosial-politik yang berbeda. Maka dari itu fungsi dari pembagian kekuasaan pada setiap negara berbeda, yaitu tergantung dari situasi dan kondisinya.

Terdapat sebuah perspektif bahwa *power-sharing* dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian konflik yang dominan, sehingga pada beberapa negara, sistem pembagian kekuasaan ini diterapkan pada saat pasca atau bahkan konflik itu terjadi, hal ini dilakukan guna memberikan hak-hak politik dan kekuasaan kepada kelompok pemberontak maupun kelompok *kontra*. Sehingga *power-sharing* dianggap sebagai solusi ampuh yang diperkenalkan di banyak negara yang dilanda konflik. Beberapa kasus membuktikan bahwa *power-sharing* digunakan sebagai alat yang banyak digunakan dan diterapkan, tidak hanya untuk meredakan ketegangan etnis yang terjadi di Kenya pada saat setelah pemilihan di bulan Desember 2007. Bahkan *power-sharing* juga digunakan sebagai alat atau solusi untuk mengurangi konflik politik antara Gerakan Tswangerai untuk Peubahan Demokratis dan Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe Mugabe (*Partriotic Font*) di Zimbabwe, serta digunakan untuk mengakhiri perang saudara di Bosnia, Burundi, Kamboja, Lebanon, Nepal dan Sierra Leone.<sup>33</sup>

Namun, beberapa akademisi meyakini bahwa penggunaan *power-sharing* sebagai solusi penyelesaian masalah pasca konflik dinilai hanya bersifat sementara, karena pada akhirnya pembagian kekuasaan akan menimbulkan masalah baru lagi dalam pengambilan keputusan. Selain itu penerapan sistem

---

<sup>33</sup> Ian S. Spears, *Op. Cit.*, hal.125-126

pembagian kekuasaan pada negara yang pasca konflik dianggap tidak relevan dan efektif. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai bahwa pembagian kekuasaan atau memberikan kelompok pemberontak/kelompok *kontra* sebuah kekuasaan dianggap telah melakukan atau *pro* terhadap kejahatan, dalam kata lain secara tidak langsung telah mendukung adanya pemberontak. Dalam hal ini dengan melihat fenomena diatas, pembagian kekuasaan atau *power-sharing* dilihat sebagai pendekatan ‘manajemen konflik’ yang mempelajari kekuatan berbagi peran dalam mencapai perdamaian pasca-konflik.<sup>34</sup>

Disamping itu, terdapat pula perspektif yang meyakini *power-sharing* atau pembagian kekuasaan menjadi satu-satunya sebuah alternatif untuk masyarakat yang terbagi sebagai cara untuk menciptakan demokrasi yang stabil. Namun terlepas dari inklusi luas dalam pemerintahan bersama, pemahaman *power-sharing* mulai bervariasi dan hanya menyarankan untuk berbagi kekuasaan dengan memberikan sedikit panduan bagi pembuat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya konflik. Literatur tentang pembagian kekuasaan dapat mencapai kesimpulan yang berbeda karena tidak ada konsensus tentang apa itu pembagian kekuasaan, tujuan serta bagaimana cara mempelajarinya. Sebagai sistem politik, pembagian kekuasaan dipelajari, disarankan, dan diimplementasikan dari dua hasi pemikiran, yaitu: demokrasi dan perdamaian. Dengan demikian kedua perspektif tersebut berasumsi bahwa masyarakat memang membutuhkan pemerintahan dengan model yang tidak ada konfliktual serta anti dengan kekerasan. Sehingga, dalam kedua kasus tersebut tujuan

---

<sup>34</sup> Arend Lijphart, 2008, *Thinking about Democracy: Power sharing and majority rule in theory and practice*, USA: ROUTLEDGE, hal. 25.

pembagian kekuasaan adalah untuk menghindari konflik, yang pada akhirnya untuk mencapai perdamaian.<sup>35</sup>

Selain itu, penerapan sistem *power-sharing* pada negara-negara multietnis yang perdamaianannya masih terjaga digunakan untuk mempertahankan perdamaian itu sendiri, dengan kata lain bahwa penerapan pembagian kekuasaan tersebut ditujukan untuk pencegahan konflik antar ras maupun kelompok beragama lainnya. Pembagian kekuasaan dalam hal ini merupakan sebuah konsensus pendekatan ‘teori demokrasi’ yang berfokus pada sarana untuk mencapai demokrasi yang konsisten, terutama di masyarakat yang majemuk. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan untuk menghindari kekerasan dalam masyarakat yang terbagi.

Penelitian Lijphart menunjukkan bahwa penerapan sistem *power-sharing* dalam masyarakat yang terbagi atau majemuk serta dengan kondisi negara yang relatif damai menjadi mungkin apabila elit saling bekerja sama. Kerjasama elit tersebut dapat terwujud oleh empat aspek kelembagaan, yaitu; *grand coalition*, *mutual veto*, *proportional representation system* atau sistem perwakilan proporsional dan *segmental autonomy* atau otonomi segmental. Dari keempat aspek tersebut menurut Lijphart, aspek yang paling penting adalah *grand coalition*. Di dalamnya para pemimpin dari semua segmen penting akan memerintah bersama, mencari kompromi dan konsensus, dimana, para pemimpin ini harus mewakili ‘semua kelompok bahasa, etnis, agama’ dan/atau ‘seluruh komponen masyarakat’. Lijphart juga menambahkan bahwa *grand coalition* dapat mengambil berbagai bentuk:

---

<sup>35</sup> Helga, *Loc. Cit.*

seperti kabinet koalisi besar dalam sistem parlementer, koalisi besar presiden dan pemegang jabatan puncak lainnya dalam sistem presidensial, dan dewan atau komite inklusi yang luas dengan fungsi penasehat dan koordinasi yang penting.<sup>36</sup>

Aspek kedua dari konseptualisasi Lijphart tentang *power-sharing* adalah *mutual veto*, yang mana instrument tersebut digunakan untuk memastikan perlindungan politik minoritas melalui kemampuan untuk menolak atau membuat keputusan politik. *Mutual veto* ini tidak bersifat ‘pasti’, namun dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh jawaban atas masalah tentang ‘veto yang tertunda’. Aspek ini juga dapat bersifat tidak langsung, sehingga anggota koalisi harus menyetujui keputusan untuk disetujui. Demokrasi konsosiasional selanjutnya didasarkan pada distribusi pengaruh yang proporsional, yang mana penggunaan prinsip proporsionalitas yang paling umum adalah sebagai instrument untuk mendistribusikan kursi di legislatif. Namun *propotional representation system* atau sistem perwakilan proporsional ini juga merupakan sarana untuk mengalokasikan pejabat sipil dan penunjukan peradilan dan sumber daya keuangan, serta memastikan perwakilan yang memadai dalam militer dan perusahaan milik negara.<sup>37</sup>

Sistem PR memiliki keuntungan tersendiri yaitu mampu menghasilkan legislatif yang representatif. Bagi banyak negara demokrasi baru, terutama yang menghadapi perpecahan sosial, semua kelompok penting dalam badan legislatif dapat menjadi kondisi yang hampir esensial untuk konsolidasi demokrasi. Selain itu, sistem PR ini juga diyakini dapat menjamin serta

---

<sup>36</sup> Helga, *Loc. Cit.* hal.91.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.97-98.

memfasilitasi akses setiap individu maupun partai-partai kecil atau pihak-pihak minoritas mendapat akses ke legislatif walaupun dengan jumlah suara yang cenderung berjumlah kecil. Dalam praktiknya terutama pada banyak negara demokrasi baru, pembagian kekuasaan antara pihak dan kelompok kepentingan menjadi lebih terlihat, yang mana biasanya jumlah mayoritas penduduk akan memegang kekuasaan pada politik sedangkan pada minoritas akan memegang kekuasaan ekonomi.<sup>38</sup>

Dari penjelasan Lijphart diatas, tokoh lain seperti Norris juga memberikan pendapat yang hampir sama mengenai konseptualisasi dari *power-sharing* atau pembagian kekuasaan yang intinya dapat memastikan perwakilan minoritas dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan insentif untuk kerja sama, yang pastinya mempengaruhi bebasnya pemilihan dalam parlementarisme, pemilihan *proportional representation* atau perwakilan proposional. Sehingga, hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan perdamaian, mencegah terjadinya konflik serta memperkuat demokrasi.<sup>39</sup>

Terdapat aspek terakhir dalam *power-sharing* yaitu *segmental autonomy* yang berarti aturan minoritas dimana Lijphart berpendapat bahwa mungkin bijaksana untuk membuat kebijakan sebanyak mungkin mengenai segmen yang berbeda untuk setiap masing-masing populasi. Namun, terdapat pula masalah yang menjadi perhatian khusus yaitu segmen yang meliputi agama, bahasa dan pendidikan. Biasanya masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan mendelegasikan wewenang kepada segmen individu. Dengan cara tersebut, otonomi segmental akan menghilangkan isu-isu sensitif dan yang

---

<sup>38</sup> Andrew Reynolds, dkk, 2008, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Sweden: International IDEA, hal. 57-58.

<sup>39</sup> Helga, *Loc. Cit.*

berpotensi mengganggu stabilitas dari arena politik yang lebih besar. Otonomi segmental seperti itu dapat didasarkan pada keanggotaan kelompok atau wilayah, tergantung pada distribusi demografis rakyat. Singkatnya, inti dari konsep pembagian kekuasaan Lijphart adalah pemerintahan melalui kerjasama dan konsensus elit dalam bentuk *grand coalition*, *mutual veto*, proporsionalitas dan otonomi segmental.<sup>40</sup>

Penulis menggunakan konsep *power-sharing* dalam menjelaskan penelitian ini, hal tersebut dikarenakan konsep tersebut mampu mendeskripsikan secara terperinci untuk menjawab rumusan masalah yang ada diatas. Melihat fenomena penelitian ini *power-sharing* hadir dalam peraturan-peraturan pada pilpres Singapura 2017 lalu. Dari adanya peraturan-peraturan yang ada yang pastinya telah melalui konsensus, yang mana salah satu peraturan mengakatan bahwa calon yang dapat mendaftarkan diri menjadi presiden adalah dari etnis Melayu. Hal ini merupakan bentuk langsung dari *power-sharing* yang disebutkan Lijphart bahwasanya pemilihan atau pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah adanya konflik atau mempertahankan perdamaian dalam negara multietnis yang salah satu caranya yaitu memberikan hak istimewa kepada etnis maupun kelompok minoritas.

Dari hal inilah Halimah Yacob berhasil mendapatkan kursi kepresidenan Singapura. *power-sharing* adalah konsep yang digunakan sebagai sebuah solusi untuk mencegah terjadinya konflik dalam negara yang multietnis. Sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat parlemen Singapura

---

<sup>40</sup> Arend Lijphart, *Consociational Democracy*, World Politic, Vol, 21, No, 2, hal. 207.

mengenai pilpres 2017 lalu, tentunya diyakini sebagai bentuk pencegahan konflik, mengingat Singapura adalah negara yang multietnis.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, serta model penjelasan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura tahun 2017.

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, ucapan atau tulisan adalah sumber data utama. Data lainnya seperti dokumen, arsip, dan sebagainya yang sejenis merupakan data tambahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur. Studi literatur merupakan kumpulan data yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Data atau literatur yang diperlukan dalam penelitian ini berupa tulisan baik itu buku, laporan, jurnal atau berita dari media cetak nasional dan internasional yang mendukung penelitian ini. Studi dokumentasi, dipilih oleh penulis dikarenakan adanya keterbatasan penulis untuk mencantumkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini.

Adanya keterbatasan tersebut, berimplikasi kepada sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data-data yang berbentuk laporan, buku, jurnal dan berita akan menjadi sumber data primer dalam tulisan ini.

### 1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum penelitian lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Informasi yang diperoleh dalam bentuk tertulis maupun lisan dari beberapa sumber data yang telah ditetapkan akan diteliti, dipelajari dan diinterpretasikan kedalam sebuah kompilasi narasi data yang untuk dan berkesusaian. Penulis menggunakan empat langkah tahapan umum, sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data berupa hasil bacaan dari beberapa media tersebut akan ditelaah apakah sudah berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh penulis, yaitu berkisar pada kasus faktor terpilihnya Halimah Yacob.
- 2) Reduksi data, hal ini dilakukan dengan cara melakukan abstraksi untuk membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang penting dari sebuah data.
- 3) Menyusun dalam beberapa sub-bab yang telah dikategorisasikan. Secara detail pengkategorian data ini akan memilah data yang didapat dan diharapkan akan menampilkan hasil yang tepat untuk menjawab rumusan masalah.
- 4) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang didapat dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaa terhadap data-data yang bias agar dapat diinterpretasikan sehingga dapat masuk kedalam proses-proses pengambilan kesimpulan.



- 5) Penarikan kesimpulan. Proses ini bergantung pada kumpulan data dan catatan yang didapat selama masa penelitian. Kemudian data akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang bersifat utuh, dan tuntas sebagai satu kesatuan fakta. Bentuk dari kesimpulan yang nantinya diambil adalah sebuah narasi deskriptif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura tahun 2017.

## **1.8 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam sebuah penelitian sendiri diperlukan adanya batasan waktu dan materi untuk membatasi waktu yang diteliti dan pembahasan agar tidak melebar sehingga didapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat.

### **1.8.1 Batasan Waktu**

Peneliti memberi batasan waktu pada tahun 2014-2018, karena faktor akan terlihat atau dapat dianalisa 5 tahun terakhir atau sebelum Halimah Yacob terpilih.

### **1.8.2 Batasan Materi**

Batasan materi adalah proses konsolidasi Halimah Yacob sebelum menjadi Presiden. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini memfokuskan pada nilai-nilai serta sejarah *power-sharing* sebagai konsep untuk menelaah faktor terpilihnya Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura pada tahun 2017.

## **1.9 Argumen Dasar**

Terpilihnya Halimah Yacob menjadi presiden Singapura pada pemilu 2017 lalu diduga dipengaruhi oleh faktor tertentu. Berdasarkan generalisasi penulisan diatas serta melihat fenomena pada penelitian ini, apabila dianalisis

menggunakan *power-sharing*, maka terpilihnya Halimah Yacob menjadi presiden Singapura tahun 2017 diduga dikarenakan hadirnya dimensi *power-sharing* yang diimplementasikan pada peraturan pemilihan presiden.

#### 1.10 Sistematika Penulisan

Pada bab sistematika penulisan ini, penulis akan menjabarkan beberapa bab, dimana pembagiannya akan disesuaikan dengan urutan-urutan dalam kerangka pemikiran yang dibentuk pada keseluruhan pada penelitian dari penulis. Adapun sederhananya yaitu sistematika penulisan penelitian ini kemudian dijabarkan dengan cara berurut sampai dengan bab terakhir, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Sistematika Penulisan**

<b>Bab. I Pendahuluan:</b>	<b>1.1</b> Latar Belakang Masalah <b>1.2</b> Rumusan Masalah <b>1.3</b> Tujuan Penelitian <b>1.4</b> Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis <b>1.5</b> Penelitian Terdahulu <b>1.6</b> Kerangka Konsep 1.6.1 Konsep <i>Power-Sharing</i> <b>1.7</b> Metode Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 1.7.3 Teknik Analisis Data <b>1.8</b> Ruang Lingkup Penelitian 1.8.1 Batasan Waktu 1.8.2 Batasan Materi <b>1.9</b> Argumen Dasar <b>1.10</b> Sistematika Penulisan
<b>Bab. II:</b>  <b>Gambaran Umum Pemilu di Singapura &amp; Profil Politik Halimah Yacob</b>	<b>2.1</b> Sistem Politik Pemerintahan Singapura 2.1.1 Sistem Pemerintahan 2.1.2 Sistem Politik <b>2.2</b> Sistem Pemilu dan Sistem Partai 2.2.1 Model Partai di Singapura 2.2.2 Pemilu di Singapura

<b>Bab. III:</b> <b>Pemilu Singapura Tahun 2017</b>	<b>3.1</b> Proses Kandidasi <b>3.2</b> Profil Politik Halimah Yacob <b>3.3</b> Isu Politik Menjelang Pemilu Singapura Tahun 2017
<b>Bab. IV:</b> <b>Kemenangan Halimah Yacob</b>	<b>4.1</b> Peraturan Pilpres Singapura tahun 2017 <b>4.2</b> Analisa <i>Power-Sharing</i> terhadap Kemenangan Halimah Yacob 4.2.1 <i>Power-Sharing</i> dalam Peraturan Etnis Melayu 4.2.2 <i>Power-Sharing</i> dalam Peraturan Swasta 4.2.3 <i>Power-Sharing</i> dalam Peraturan Publik
<b>Bab. V:</b> <b>Penutup</b>	<b>5.1</b> Kesimpulan <b>5.2</b> Saran

